



Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan

Jakarta, 5 Desember 2023



TuK INDONESIA

Edi Sutrisno

Outline

- Pendahuluan
- Metode
- Hasil
- Simpulan
- Rekomendasi

(1) Pendahuluan

Mengapa Studi dilakukan?



1.1 Latar Belakang

Pencabutan izin lebih didasari pada efisiensi ekonomi

Padahal upaya pemulihan lingkungan tidak bisa dikesampingkan

Pengendalian perubahan iklim memerlukan dana besar

Sejumlah uang banyak disalurkan justru pada sektor yang merusak hutan & memperburuk iklim

Momentum pencabutan izin harus mampu menjawab persoalan ketimpangan, konflik, pemulihan lingkungan

Indikator pencabutan izin dapat diperluas pada aspek *Environmental, Social, Governance* (ESG/LST)

1.2 Tujuan & Manfaat

Tujuan

Menganalisa pencabutan izin konsesi kawasan hutan dari aspek lingkungan hidup

Manfaat

1. Menyediakan model pendekatan evaluasi perizinan pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara berkala, pada aspek Lingkungan, Sosial, Tata kelola (LST);
2. Identifikasi risiko khususnya pada aspek lingkungan.

1.3 Ruang Lingkup

Kategori	SK MenLHK No 1/2022		Studi	
	Jumlah Izin	Luas Izin (Ha)	Jumlah Izin	Luas Izin (Ha)
Perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan 2022	192	3,13 juta	175	3,02 juta
Perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan untuk evaluasi	106	1,36 juta	80	1,47 juta
Total	298	4,49 juta	255	4,49 juta

Catatan: terdapat gap karena detailing perbedaan antara luas total SK dan luas total pengolahan

meliputi izin eksisting:

- 38 IUP tambang
- 27 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan d.h. IUPHHK-HA
- 47 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan d.h. IUPHHK-HT
- 143 Izin perkebunan sawit

(2) Metode



2.1 Pelaksanaan, Data & Analisa Data

Waktu

▶▶ Januari-Maret 2022

Pengumpulan Data

- ▶▶ Data sekunder:
1. Daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan 2022 dan evaluasi → KLHK (2022)
 2. Data jenis tanah → FAO (2004)
 3. Data DEM SRTM 4 → earth explorer (2022)
 4. Data curah hujan 10 tahun terakhir periode 2011-2021 → BMKG (2022)

Analisa Data

- ▶▶ Penentuan fungsi kawasan hutan dilakukan dengan metode skoring pada 3 jenis data (jenis tanah, DEM dan curah hujan)
- ▶▶ Fungsi kawasan hutan yang dinilai → Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- ▶▶ Tahapan metode skoring:
- i. Pengelompokkan data dan pemberian bobot pada masing-masing kelas tipe data
 - ii. Intersect tiga tipe data dan penjumlahan total skoring pada HGU;
 - iii. Klasifikasi status fungsi kawasan hutan dengan fungsi *query table*
 - iv. Analisis sebaran jenis tanah dan tingkat kelerengan pada masing-masing HGU dengan fungsi *query table*

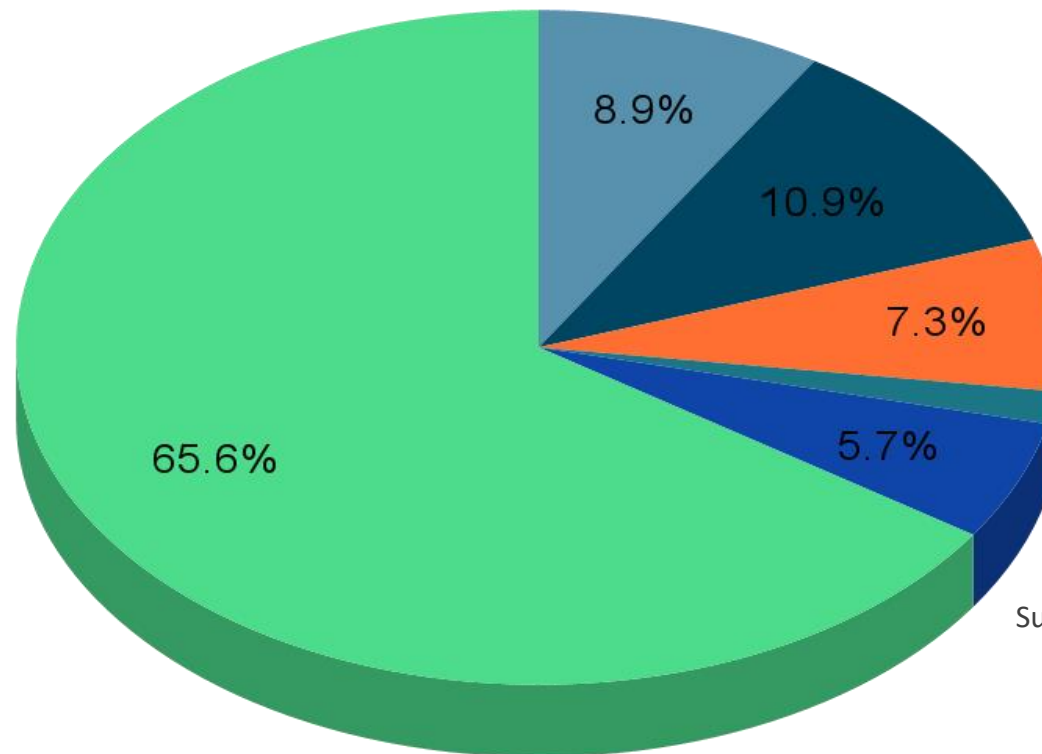
(3) Hasil



3.1 Jenis Izin Konsesi Kehutanan

DICABUT TAHUN 2022

►► Didominasi pada Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 65,6% atau seluas 1,7 juta ha → menjadi catatan pada indikator tata kelola (indikasi lemahnya pengawasan dari K/L terkait)

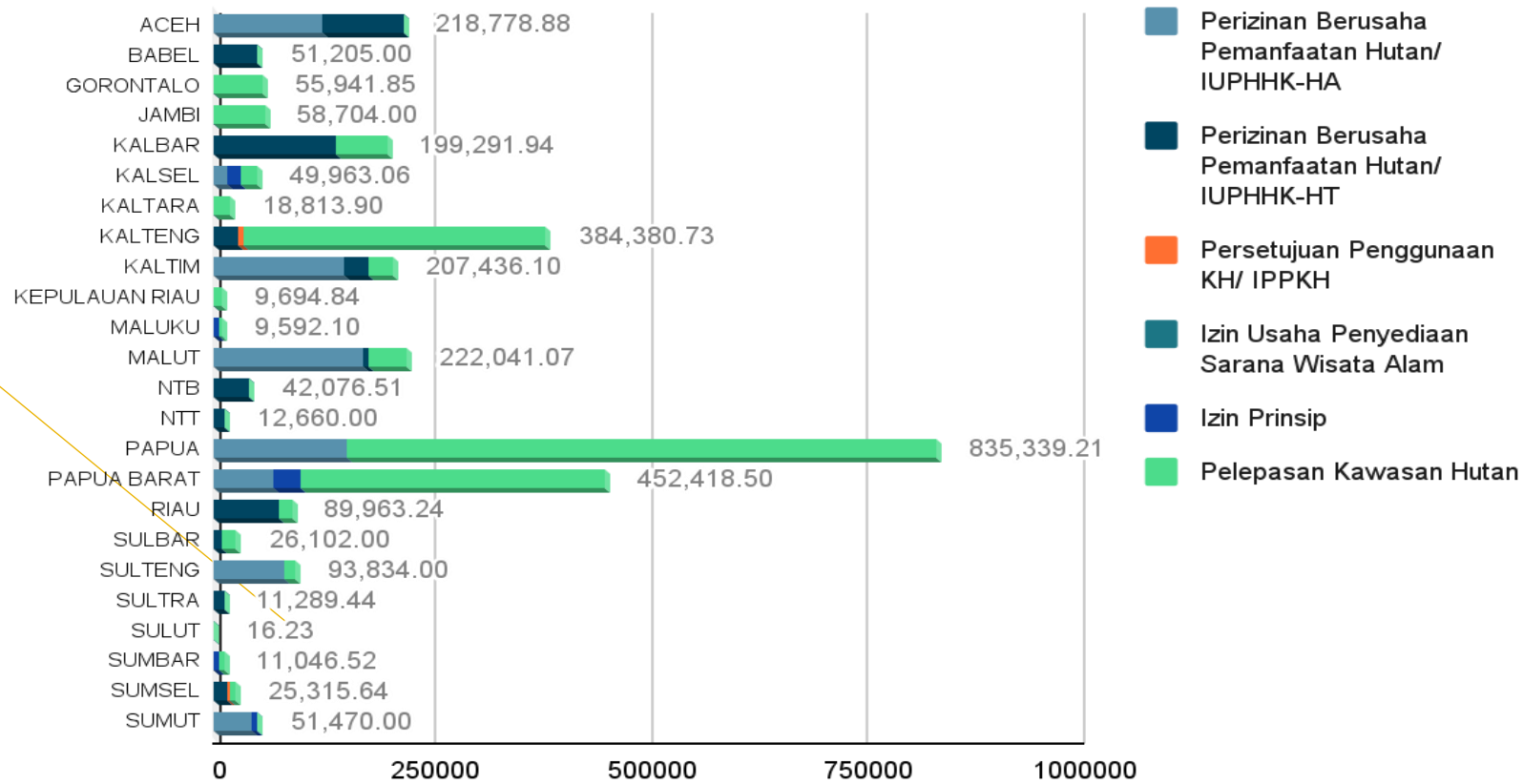


- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/ IUPHHK-HA
- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/ IUPHHK-HT
- IPPKH
- Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
- Izin Prinsip
- Pelepasan KH

Sumber: Hasil olahan (2022)

3.2 Sebaran Wilayah Izin Konsesi Kehutanan

DICABUT TAHUN 2022



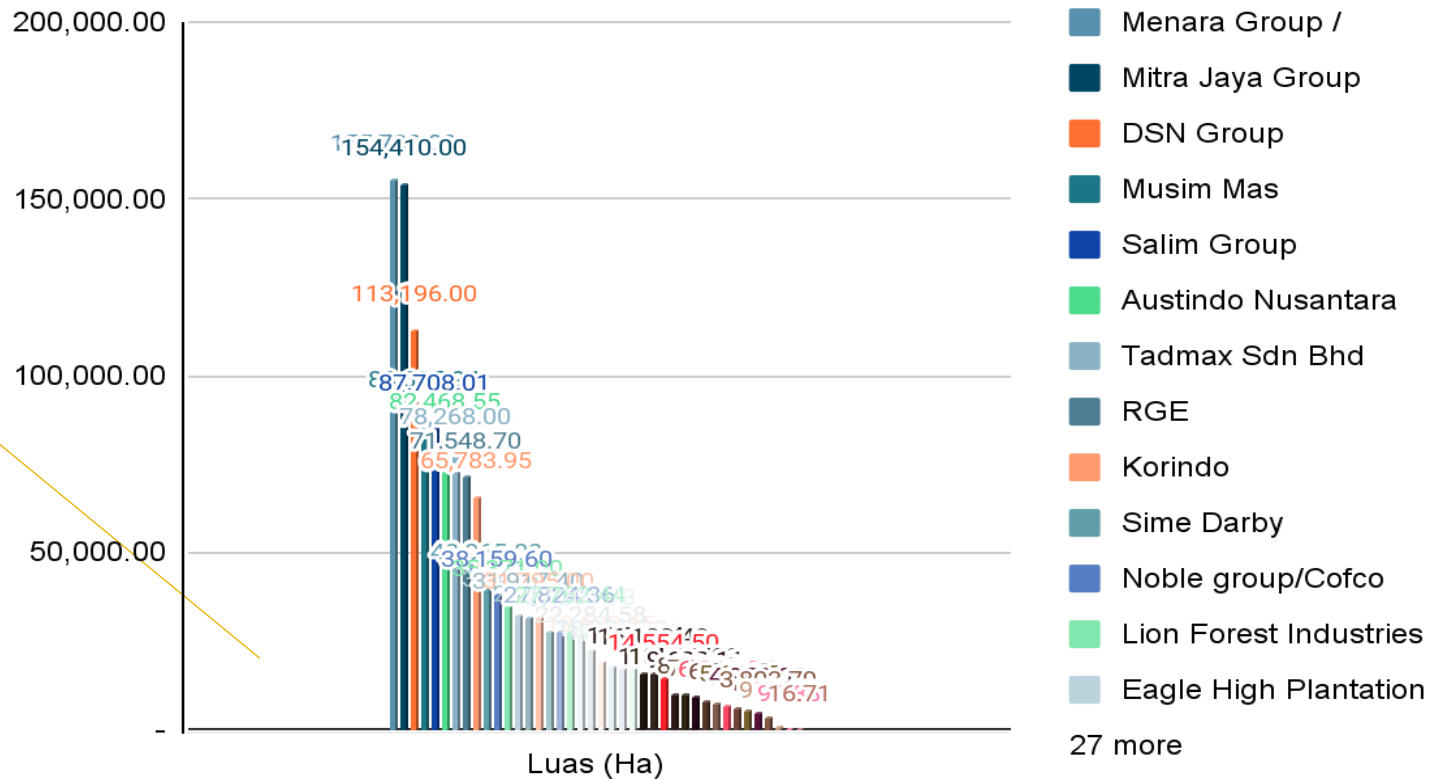
► **Papua, Papua Barat, Kalteng.**
Tiga besar Provinsi terluas dalam pencabutan izin konsesi kehutanan 2022

Sumber: Hasil olahan (2022)

Keterangan: studi dilakukan sebelum pemekaran Papua menjadi lima Provinsi

3.3 Luas Izin Konsesi Kehutanan

DICABUT TAHUN 2022

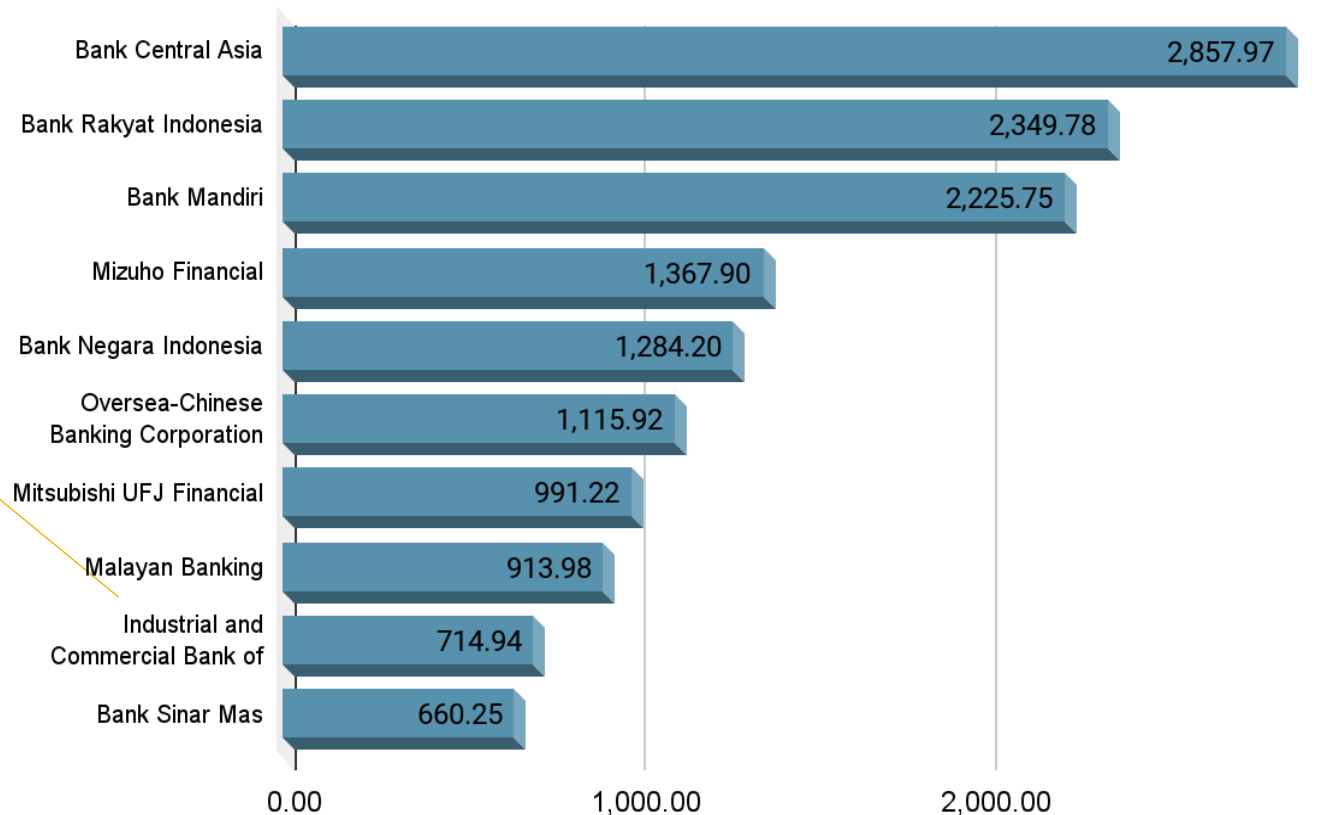


Sumber: Hasil olahan (2022)

- Sebesar 46% luas izin konsesi kehutanan yang dicabut 2022, terafiliasi dengan 40 grup perusahaan.
- Menara, Mitra Jaya, DSN, Musim Mas, Salim, Austindo, Tadmax, Royal Golden Eagle, Korindo, dan Sime Darby adalah 10 grup perusahaan teratas yang izinnya dicabut.

3.4 Sepuluh Teratas Kreditor

GRUP PERUSAHAAN TERAFILIASI DICABUT TAHUN 2022
TAHUN 2017-2021 (DALAM JUTA DOLAR AS)

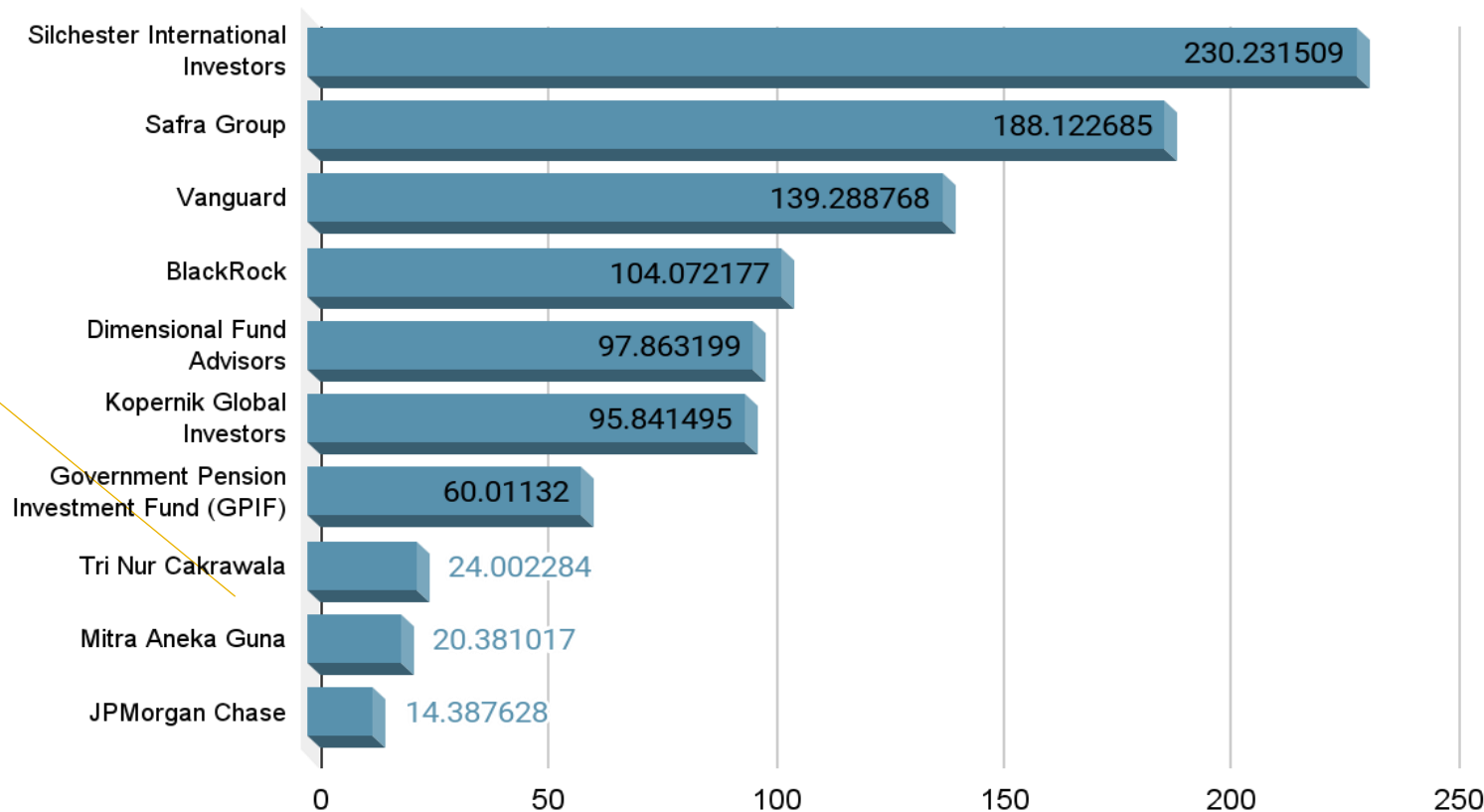


Sumber: Hasil olahan (2022)

- ▶▶ 26,62 miliar dolar AS, utang dan penjaminan telah disalurkan sepanjang 2017-2021 untuk grup perusahaan yang izinnya dicabut 2022.
- ▶▶ BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Sinar Mas menjadi kreditor teratas yang berasal dari Indonesia dengan menyediakan 9,37 miliar dolar AS atau 35% dari total kredit.

3.5 Sepuluh Teratas Investor

GRUP PERUSAHAAN TERAFILIASI DICABUT TAHUN 2022
TAHUN 2021 (DALAM JUTA DOLAR AS)



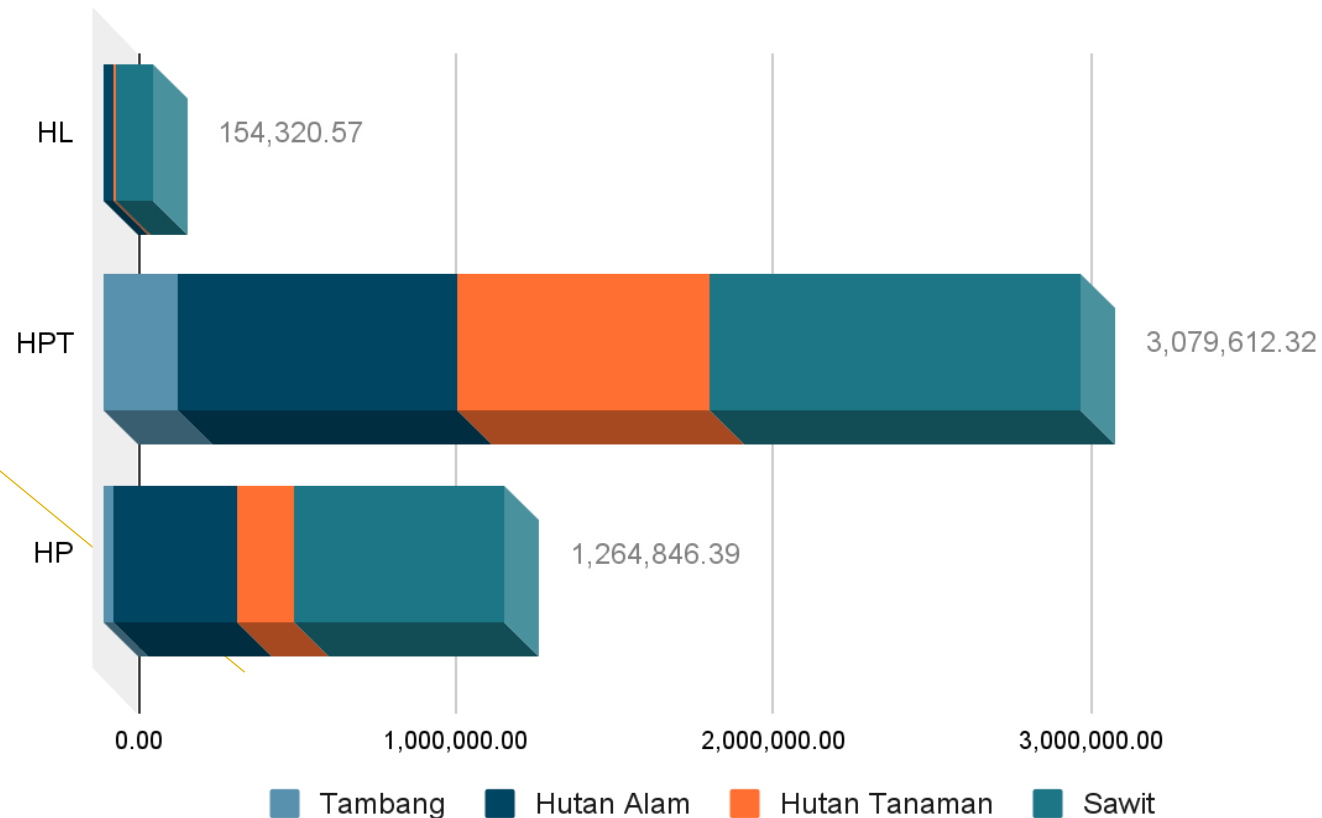
Sumber: Hasil olahan (2022)

▶▶ Pada 2021 sebesar 1,25 miliar dolar AS telah disalurkan oleh investor dalam bentuk obligasi dan menjadi pemegang saham untuk grup perusahaan yang izinnya dicabut.

▶▶ Sepuluh teratas investor tersebut dominan berasal dari asing seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang.

3.6 Intensitas Pengelolaan Berdasar Hasil Skoring

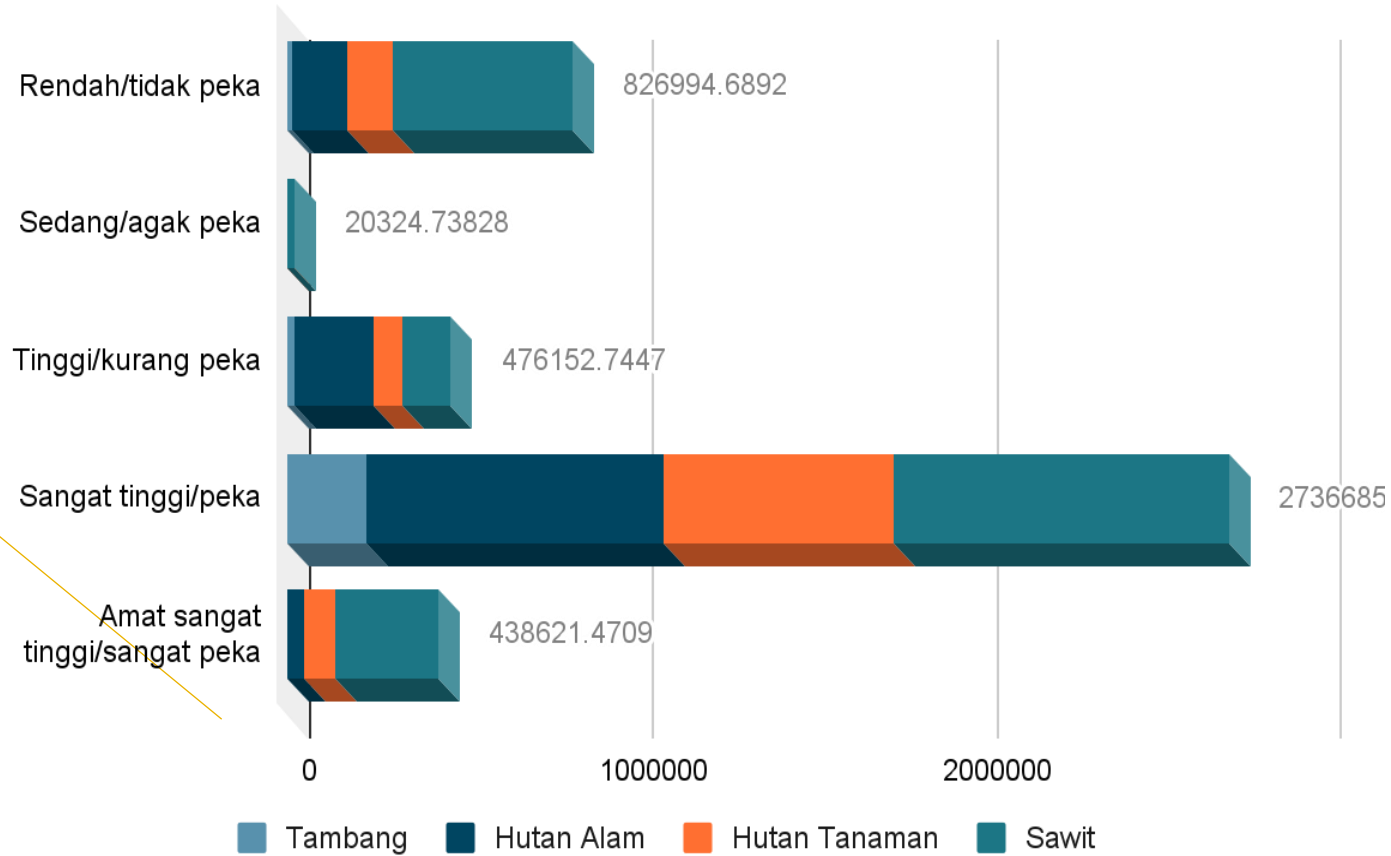
FUNGSI KAWASAN HUTAN



Sumber: Hasil olahan (2022)

- ▶▶ Pencabutan izin layak dari aspek lingkungan.
- ▶▶ 72% areal konsesi yang dicabut merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit

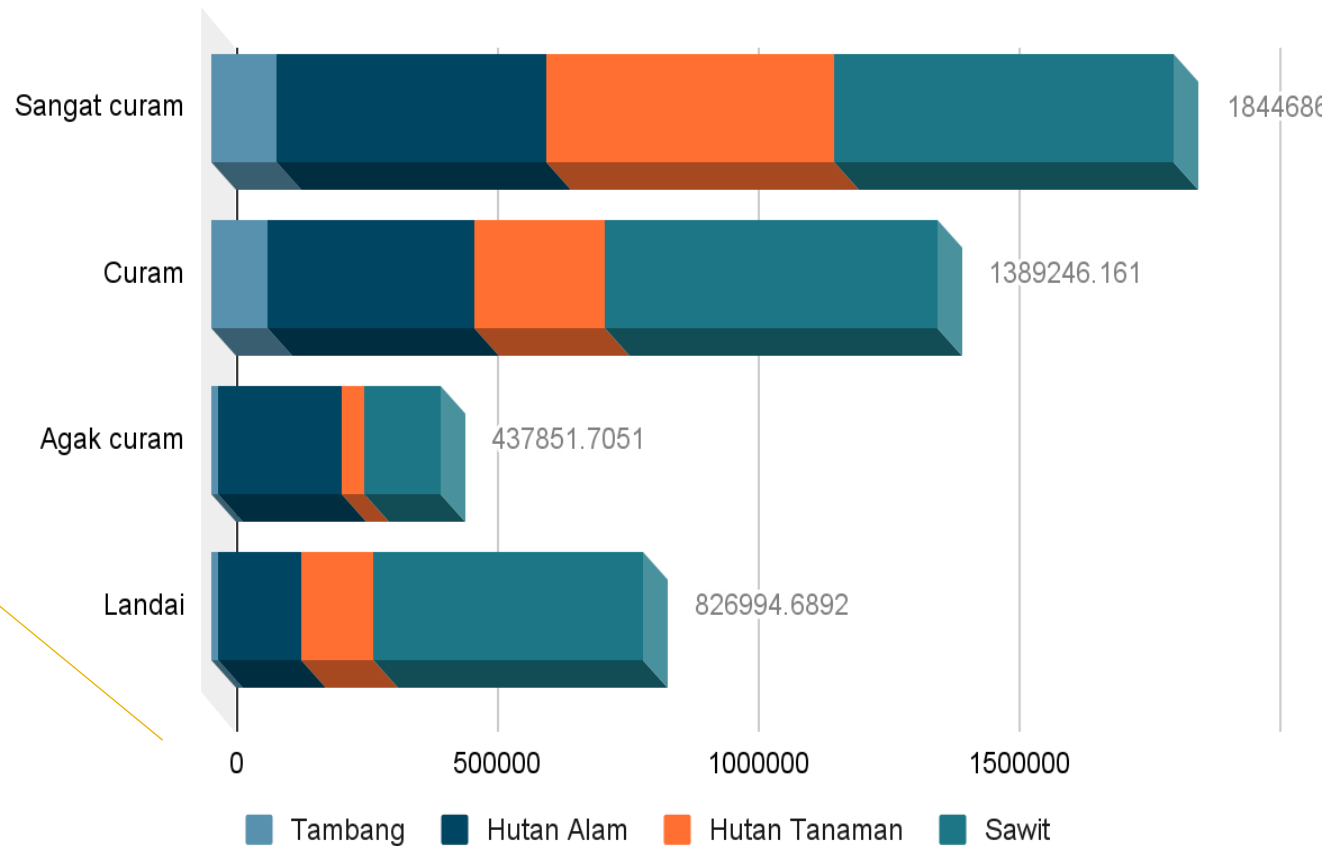
3.7 Kelas Tanah



Sumber: Hasil olahan (2022)

- ▶▶ Semua jenis izin (sektor) dominan pada kelas tanah kepekaan sangat tinggi/ peka.
- ▶▶ Mengindikasikan tingginya risiko bencana pada kawasan-kawasan konsesi.

3.8 Kelas Lereng



Sumber: Hasil olahan (2022)

- ▶▶ Izin yang dicabut mayoritas berada dalam kelas kelerengan sangat curam → indikasi kerentanan perubahan tutupan dan permukaan tanah yang berdampak pada risiko kerentanan bencana ekologis.
- ▶▶ Sektor Hutan Tanaman memiliki presentase paling tinggi dalam kelas lereng sangat curam, mencapai sebesar 55,9%.

(4) Simpulan & Rekomendasi

4.1 Simpulan

- Pencabutan izin konsesi kehutanan 2022 paling banyak berada pada Pelepasan Kawasan Hutan → 65,6% atau 1,7 juta ha.
- Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah → tiga besar Provinsi terluas dalam pencabutan izin konsesi kehutanan 2022.
- 46% luas izin konsesi kehutanan yang dicabut 2022 → terafiliasi dengan 40 grup perusahaan.
- 26,62 miliar dolar AS, utang dan penjaminan telah disalurkan sepanjang 2017-2021 untuk grup perusahaan yang izinnya dicabut 2022.
- 1,25 miliar dolar AS pada 2021 telah disalurkan oleh investor dalam bentuk obligasi dan menjadi pemegang saham untuk grup perusahaan.
- Pertimbangan lingkungan hidup menjadi penting dalam Indikator pencabutan izin, mengingat dari temuan studi ini:
 1. Sebesar 72% areal konsesi yang dicabut merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit
 2. Indikasi kerentanan bencana ekologis dominan jika memperhatikan faktor kelas tanah, baik dari sisi kepekaan (dominan pada kepekaan sangat tinggi), maupun dari sisi kelas kelerengan tanah yang dominan pada tingkat sangat curam.

4.2 Rekomendasi

Mengutamakan pemulihan lingkungan hidup pada eks-konsesi yang telah dicabut → dibutuhkan indikator yang lebih jelas serta detail dalam aspek lingkungan, secara komprehensif pendekatan indikator LST (Lingkungan-Sosial-Tata Kelola)

Evaluasi perizinan tidak saja ditujukan kepada pemegang izin, tetapi juga pemberi izin

Pengaturan detail pada eks konsesi untuk pengembalian Hak kepada rakyat, baik dalam konteks akses (seperti Perhutanan-Sosial, dll), maupun dalam kontek aset (redistribusi)

Terima kasih





Hubungi Kami



TuK INDONESIA



0251 8367837



office@tuk.or.id



www.tuk.or.id